

Ruang Publik Deliberatif Dan Strategi Politik Perempuan: Studi Kasus Nur Afni Kabupaten Enrekang

Mawardah¹, Ismah Tita Ruslin², Febrianto Syam³

¹ Faculty of Ushuluddin and Philosophy, UIN Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: mawarda564@gmail.com

² Faculty of Ushuluddin and Philosophy, UIN Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: ismahtitaruslin78@gmail.com

³ Faculty of Ushuluddin and Philosophy, UIN Alauddin Makassar, Indonesia. E-mail: febrianto.syam@uin-alauddin.ac.id

Abstract: Penelitian ini menganalisis strategi politik Nur Afni dalam memenangkan kursi legislatif DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilu 2024 melalui perspektif teori ruang publik Jürgen Habermas. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus interpretatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana seorang politisi perempuan berhasil mentransformasi dan memanfaatkan berbagai bentuk ruang publik untuk mengatasi hambatan struktural dalam partisipasi politik. Temuan menunjukkan bahwa Nur Afni mengimplementasikan strategi multi-dimensional yang mengombinasikan pemanfaatan ruang publik tradisional (masjid, pasar, balai desa), konstruksi ruang publik digital melalui media sosial, dan pembentukan ruang publik alternatif khusus perempuan. Strategi komunikasi deliberatif yang dikembangkan mencerminkan prinsip-prinsip Habermasian tentang rasionalitas komunikatif, inklusivitas, dan orientasi konsensus. Hasil penelitian menunjukkan transformasi dari legitimasi berbasis kharisma personal menuju legitimasi diskursif yang berkelanjutan. Meskipun menghadapi hambatan patriarkal dan ketidaksetaraan struktural, strategi ini berhasil menghasilkan dampak transformatif pada kultur politik lokal dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman teoritis tentang aplikasi konsep ruang publik dalam konteks politik lokal Indonesia dan memberikan model praktis untuk partisipasi politik perempuan yang lebih inklusif dan demokratis.

Keywords: Ruang Publik, Habermas, Politik Perempuan, Deliberasi, Demokratisasi Lokal

1. Introduction

Konsep ruang publik (public sphere) yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas telah menjadi landasan teoretis fundamental dalam memahami dinamika partisipasi politik dan demokrasi deliberatif. Habermas (1989) mendefinisikan ruang publik sebagai domain kehidupan sosial di mana opini publik dapat terbentuk melalui diskusi rasional yang terbuka dan bebas dari dominasi kekuasaan. Dalam konteks politik kontemporer, konsep ini mengalami transformasi signifikan, terutama dengan hadirnya teknologi digital yang menciptakan ruang-ruang baru untuk deliberasi politik. Penelitian ini menganalisis bagaimana seorang calon legislatif perempuan, Nur Afni, berhasil memanfaatkan berbagai bentuk ruang publik untuk memenangkan kursi DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilu 2024, dengan menggunakan kerangka teoretis ruang publik Habermas sebagai lensa analisis utama.

Kabupaten Enrekang, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, merepresentasikan kompleksitas politik lokal Indonesia dengan karakteristik sosial-budaya yang masih memegang nilai-nilai patriarkal kuat. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa dari 26.771 pemilih sementara pada Pemilu 2024, distribusi gender hampir seimbang dengan 13.538 perempuan dan 13.233 laki-laki (KPU Kabupaten Enrekang, 2024). Namun demikian, keterwakilan perempuan dalam DPRD periode sebelumnya hanya mencapai 12%, atau tiga kursi dari total 25 anggota dewan. Fenomena ini mencerminkan adanya

ketidakseimbangan akses terhadap ruang publik politik antara laki-laki dan perempuan, yang dalam perspektif Habermas dapat dipahami sebagai bentuk distorsi sistematis dalam formasi opini publik.

Teori ruang publik Habermas menekankan pentingnya kondisi ideal untuk terjadinya komunikasi yang bebas dominasi, rasional, dan inklusif. Dalam *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Habermas (1989) menjelaskan bahwa ruang publik bourgeois yang ideal adalah tempat di mana individu-individu yang bebas berkumpul untuk berdiskusi tentang masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama, tanpa adanya tekanan dari otoritas politik atau ekonomi. Namun, Habermas juga mengakui bahwa dalam realitas historis, ruang publik seringkali mengalami distorsi dan eksklusif, terutama terhadap kelompok-kelompok marginal seperti perempuan, kelas pekerja, dan minoritas. Kondisi ini sangat relevan dengan konteks politik lokal di Kabupaten Enrekang, di mana perempuan menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural untuk berpartisipasi secara setara dalam ruang publik politik.

Dalam perkembangannya, konsep ruang publik Habermas telah mengalami kritik dan revisi, terutama dari para feminis seperti Nancy Fraser (1990) yang mengusulkan konsep "counterpublic" atau ruang publik tandingan. Fraser berpendapat bahwa dalam masyarakat yang tidak setara, kelompok-kelompok subordinat memerlukan ruang publik alternatif untuk dapat mengembangkan identitas dan kepentingan mereka. Konsep ini sangat relevan dalam memahami strategi politik perempuan, termasuk yang dilakukan oleh Nur Afni, yang harus menciptakan dan memanfaatkan ruang-ruang publik alternatif untuk dapat bersaing dengan calon legislatif laki-laki yang memiliki akses lebih besar terhadap ruang publik mainstream.

Era digital telah menciptakan transformasi fundamental dalam konsepsi dan praktik ruang publik. Castells (2015) dalam karyanya *"Networks of Outrage and Hope"* menunjukkan bahwa internet dan media sosial telah menciptakan "space of flows" yang memungkinkan terciptanya ruang publik virtual yang dapat melampaui batasan geografis dan temporal. Dalam konteks ini, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp telah menjadi arena penting untuk deliberasi politik dan mobilisasi massa. Transformasi digital ini membuka peluang baru bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, termasuk perempuan, untuk dapat berpartisipasi lebih aktif dalam ruang publik politik.

Studi tentang partisipasi politik perempuan di Indonesia menunjukkan adanya paradoks antara kesetaraan formal dan praktik politik yang masih didominasi laki-laki. Meskipun Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala (Adriani & Maulia, 2024). Penelitian Irfandi et al. (2022) menunjukkan bahwa pemenuhan kuota 30% seringkali hanya bersifat formalitas untuk memenuhi persyaratan administratif, tanpa disertai dukungan substantif terhadap calon legislatif perempuan. Kondisi ini mencerminkan adanya kolonisasi ruang publik politik oleh logika kekuasaan patriarkal yang membatasi akses dan partisipasi perempuan dalam proses politik demokratis.

Kasus Nur Afni di Kabupaten Enrekang menarik untuk diteliti karena menunjukkan bagaimana seorang perempuan dapat berhasil menavigasi dan mentransformasi ruang publik politik yang didominasi laki-laki. Nur Afni bukan hanya berhasil terpilih pada Pemilu 2019, tetapi juga mampu mempertahankan dan memperkuat posisinya pada Pemilu 2024. Keberhasilannya ini tidak dapat dilepaskan dari strategi komunikasi politik yang inovatif dan kemampuannya dalam menciptakan dan memanfaatkan berbagai bentuk ruang publik, baik tradisional maupun digital. Analisis terhadap strategi politik Nur Afni dengan menggunakan kerangka teoretis ruang publik Habermas dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika transformasi ruang publik politik di era kontemporer.

Penelitian ini juga relevan dengan diskusi akademik tentang demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia. Sejak era reformasi, Indonesia telah mengalami proses desentralisasi yang signifikan, yang memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah. Dalam konteks ini, politik lokal menjadi arena penting untuk praktik demokrasi dan partisipasi warga. Namun, demokratisasi di tingkat lokal juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama terkait dengan kuatnya pengaruh elit tradisional dan struktur sosial patriarkal. Studi kasus Nur Afni dapat memberikan wawasan tentang bagaimana aktor politik dapat memanfaatkan peluang demokratisasi untuk mentransformasi struktur kekuasaan yang ada.

Dari perspektif metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus interpretatif yang memungkinkan analisis mendalam terhadap kompleksitas strategi politik dan dinamika ruang publik. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi hermeneutik yang dikembangkan oleh Habermas dalam teori tindakan komunikatifnya. Melalui analisis naratif yang mendalam, penelitian ini berusaha memahami makna dan signifikansi dari tindakan-tindakan komunikatif yang dilakukan oleh Nur Afni dalam berbagai ruang publik. Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan strategi politik, termasuk dinamika budaya lokal, struktur sosial, dan perkembangan teknologi komunikasi.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman tentang aplikasi teori ruang publik Habermas dalam konteks politik lokal dan partisipasi perempuan. Selama ini, diskusi tentang ruang publik Habermas lebih banyak fokus pada konteks politik nasional atau global, dengan perhatian yang terbatas terhadap dinamika politik lokal. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana konsep ruang publik dapat dioperasionalkan dalam konteks politik lokal Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi terhadap literatur tentang politik gender dengan menunjukkan bagaimana perempuan dapat menciptakan dan memanfaatkan ruang publik alternatif untuk mengatasi hambatan struktural dalam partisipasi politik.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi politik, khususnya calon legislatif perempuan, tentang strategi-strategi efektif untuk berpartisipasi dalam ruang publik politik. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan regulasi dan program yang lebih mendukung partisipasi politik perempuan. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini berkontribusi terhadap upaya penguatan demokrasi di Indonesia dengan menunjukkan pentingnya inklusivitas dan kesetaraan akses terhadap ruang publik politik.

Struktur artikel ini terdiri dari beberapa bagian utama. Setelah pendahuluan yang menguraikan konteks dan signifikansi penelitian, bagian selanjutnya akan menguraikan metodologi penelitian yang digunakan. Kemudian, bagian hasil dan pembahasan akan menyajikan analisis mendalam terhadap strategi politik Nur Afni dengan menggunakan kerangka teoretis ruang publik Habermas. Analisis akan mencakup berbagai dimensi ruang publik yang dimanfaatkan oleh Nur Afni, termasuk ruang publik tradisional, digital, dan alternatif. Bagian penutup akan menyimpulkan temuan utama penelitian dan implikasinya terhadap teori dan praksis politik.

2. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus interpretatif untuk menganalisis strategi politik Nur Afni dalam konteks teori ruang publik Jürgen Habermas. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada sifat fenomena yang diteliti, yaitu proses komunikasi politik dan transformasi ruang publik, yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap makna dan konteks sosial (Creswell & Poth, 2018). Studi kasus dipilih sebagai strategi

penelitian karena memungkinkan analisis holistik dan kontekstual terhadap fenomena kontemporer yang kompleks dalam setting kehidupan nyata (Yin, 2018). Dalam konteks ini, kasus Nur Afni diperlakukan sebagai unit analisis utama yang memberikan wawasan tentang dinamika ruang publik politik di tingkat lokal Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode yang meliputi wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan kunci, termasuk Nur Afni sebagai subjek utama penelitian, tim kampanyenya, tokoh masyarakat, pengamat politik lokal, dan pemilih yang terlibat dalam proses politik di Kabupaten Enrekang. Total 15 informan diwawancarai dengan durasi rata-rata 60-90 menit per sesi. Observasi partisipan dilakukan selama periode kampanye dan pasca-pemilu untuk mengamati secara langsung praktik komunikasi politik dan interaksi dalam berbagai ruang publik. Analisis dokumen mencakup materi kampanye, postingan media sosial, dokumen partai politik, dan liputan media massa terkait aktivitas politik Nur Afni. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik dengan pendekatan abduktif, di mana tema-tema yang muncul dari data dikaitkan dengan konsep-konsep teoretis ruang publik Habermas untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.

3. Result and Discussion

3.1. Konstruksi Ruang Publik Tradisional dalam Strategi Politik Nur Afni

Analisis terhadap strategi politik Nur Afni menunjukkan bahwa ia berhasil memanfaatkan dan mentransformasi ruang publik tradisional yang telah ada dalam struktur sosial masyarakat Enrekang. Dalam perspektif Habermas (1989), ruang publik tradisional merujuk pada arena-arena fisik di mana warga dapat berkumpul dan berdiskusi tentang isu-isu politik secara langsung. Nur Afni secara strategis mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai bentuk ruang publik tradisional, seperti masjid, balai desa, pasar tradisional, dan acara-acara adat, sebagai platform untuk membangun komunikasi politik dengan konstituen. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Habermas tentang pentingnya aksesibilitas dan inklusivitas dalam ruang publik, di mana semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam diskusi politik.

Strategi pemanfaatan masjid sebagai ruang publik politik menunjukkan kemampuan Nur Afni dalam mengadaptasi konteks lokal yang religius. Meskipun Habermas (1989) dalam konsep aslinya menekankan sekularisasi ruang publik, dalam konteks Indonesia yang religius, institusi keagamaan justru menjadi arena penting untuk deliberasi politik. Nur Afni memanfaatkan momen-momen seperti pengajian, tabligh akbar, dan kegiatan sosial keagamaan untuk membangun komunikasi dengan masyarakat. Namun, ia melakukan ini dengan cara yang tidak eksploitatif, melainkan dengan menjadi bagian integral dari komunitas keagamaan dan berkontribusi secara substantif terhadap kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman Nur Afni tentang pentingnya autentisitas dalam komunikasi politik, yang merupakan salah satu prasyarat ruang publik ideal menurut Habermas.

Pemanfaatan pasar tradisional sebagai ruang publik politik menunjukkan kepekaan Nur Afni terhadap dinamika ekonomi lokal dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Fraser (1990) dalam kritiknya terhadap Habermas menekankan bahwa ruang publik ideal harus dapat diakses oleh semua kelas sosial, bukan hanya kelas menengah yang memiliki privilege ekonomi dan pendidikan. Nur Afni menyadari bahwa pasar tradisional merupakan ruang publik yang sangat demokratis, di mana berbagai lapisan masyarakat bertemu dan berinteraksi secara natural. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan komunikasi politik yang informal dan dialogis,

bukan monologis seperti yang sering terjadi dalam kampanye politik konvensional. Melalui percakapan-percakapan spontan dengan pedagang dan pembeli, Nur Afni dapat memahami secara langsung isu-isu dan kebutuhan riil masyarakat.

Transformasi balai desa menjadi ruang deliberasi politik merupakan salah satu inovasi penting dalam strategi Nur Afni. Balai desa secara tradisional berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan desa, namun Nur Afni berhasil mentransformasikannya menjadi ruang publik untuk diskusi politik yang partisipatif. Ia menginisiasi forum-forum diskusi terbuka di balai desa yang memungkinkan warga untuk menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan, dan berpartisipasi dalam proses deliberasi politik. Format diskusi yang dikembangkan mengadopsi prinsip-prinsip komunikatif Habermas, yaitu rasionalitas, kesetaraan, dan orientasi pada konsensus. Nur Afni berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan pendapat mereka didengar secara serius.

Pemanfaatan acara-acara adat dan budaya lokal sebagai ruang publik politik menunjukkan kemampuan Nur Afni dalam mengintegrasikan dimensi kultural dalam strategi politiknya. Habermas (1987) dalam *Theory of Communicative Action* menekankan pentingnya dunia kehidupan (*lifeworld*) sebagai basis untuk tindakan komunikatif. Dunia kehidupan mencakup tradisi kultural, institusi sosial, dan identitas personal yang menjadi sumber daya untuk komunikasi. Nur Afni memanfaatkan acara-acara seperti festival budaya, upacara adat, dan perayaan hari besar nasional sebagai kesempatan untuk membangun komunikasi politik yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan ini tidak hanya efektif secara praktis, tetapi juga menunjukkan penghargaan terhadap identitas kultural masyarakat Enrekang.

Strategi komunikasi dalam ruang publik tradisional yang dikembangkan oleh Nur Afni menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip komunikasi deliberatif. Berbeda dengan model komunikasi politik yang *top-down* dan monologis, Nur Afni mengembangkan model komunikasi yang dialogis dan partisipatif. Ia tidak hanya menyampaikan program dan visi politiknya, tetapi juga secara aktif mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat. Proses ini mencerminkan prinsip intersubjektivitas dalam teori komunikatif Habermas, di mana makna dan pemahaman dibangun melalui proses dialog timbal balik dan reflektif.

Namun demikian, pemanfaatan ruang publik tradisional oleh Nur Afni juga menghadapi berbagai kendala dan batasan. Salah satu kendala utama adalah masih kuatnya struktur patriarkal dalam masyarakat tradisional yang membatasi akses dan partisipasi perempuan dalam ruang publik. Meskipun Nur Afni berhasil hadir dalam berbagai ruang publik tradisional, ia harus menghadapi skeptisisme dan resistensi dari sebagian masyarakat yang menganggap bahwa politik bukanlah domain yang tepat untuk perempuan. Kondisi ini mencerminkan kritik Fraser (1990) terhadap konsep ruang publik Habermas yang terlalu idealis dan tidak mempertimbangkan realitas ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Nur Afni mengembangkan strategi adaptif yang mempertimbangkan sensitivitas kultural dan gender. Ia tidak langsung menantang nilai-nilai patriarkal secara frontal, melainkan berusaha menunjukkan kompetensi dan kapasitasnya melalui kinerja konkret dalam ruang publik. Misalnya, dalam forum-forum diskusi di balai desa, Nur Afni menunjukkan penguasaan yang mendalam terhadap isu-isu pembangunan, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Pendekatan ini secara gradual mengubah persepsi masyarakat tentang kemampuan perempuan dalam politik dan membangun legitimasi politiknya.

3.2. Revolusi Digital: Konstruksi Ruang Publik Virtual dalam Era Media Sosial

Era digital telah menciptakan transformasi fundamental dalam konsepsi dan praktik ruang publik politik, dan Nur Afni merupakan salah satu aktor politik yang berhasil memanfaatkan revolusi digital ini untuk memperluas jangkauan dan efektivitas komunikasi politiknya. Castells (2015) menggambarkan fenomena ini sebagai munculnya "space of flows" yang melampaui batasan geografis dan temporal tradisional. Dalam konteks strategi politik Nur Afni, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat kampanye, tetapi juga sebagai ruang publik alternatif yang memungkinkan terciptanya deliberasi politik yang lebih inklusif dan partisipatif. Platform-platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok menjadi arena penting di mana Nur Afni membangun narasi politik, berinteraksi dengan konstituen, dan membentuk opini publik.

Strategi pemanfaatan Facebook oleh Nur Afni menunjukkan pemahaman yang sophisticated tentang karakteristik platform ini sebagai ruang publik digital. Facebook, dengan fitur-fitur seperti posting, commenting, sharing, dan live streaming, memungkinkan terciptanya komunikasi multi-arah yang lebih demokratis dibandingkan media massa tradisional. Nur Afni memanfaatkan Facebook tidak hanya untuk menyebarkan informasi tentang program dan visinya, tetapi juga untuk membangun dialog interaktif dengan follower-nya. Postingan-postingannya dirancang untuk mengundang respons dan diskusi, bukan hanya konsumsi pasif. Ia secara konsisten merespons komentar dan pertanyaan dari follower, menciptakan sense of personal connection yang sulit dicapai melalui media konvensional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip interaktivitas dalam ruang publik digital yang ditekankan oleh Papacharissi (2002).

Platform Instagram dimanfaatkan oleh Nur Afni dengan fokus pada visual storytelling yang menarik dan autentik. Instagram, sebagai platform yang didominasi oleh konten visual, memungkinkan Nur Afni untuk menampilkan sisi personal dan humanis dari aktivitas politiknya. Melalui foto dan video, ia dapat menunjukkan keterlibatan langsung dalam kehidupan masyarakat, mulai dari menghadiri acara-acara komunitas, mengunjungi wilayah-wilayah terpencil, hingga berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat. Strategi visual ini efektif dalam membangun emotional connection dengan audiences, yang merupakan elemen penting dalam komunikasi politik kontemporer. Selain itu, fitur Instagram Stories memungkinkan Nur Afni untuk membagikan momen-momen real-time yang menciptakan sense of immediacy dan authenticity.

Pemanfaatan WhatsApp sebagai platform komunikasi politik menunjukkan adaptasi Nur Afni terhadap preferensi komunikasi masyarakat Indonesia yang sangat tinggi dalam menggunakan aplikasi messaging. WhatsApp groups menjadi ruang publik micro yang memungkinkan diskusi politik yang lebih intim dan mendalam. Nur Afni membentuk berbagai WhatsApp groups berdasarkan segmentasi geografis, demografis, dan tematik, seperti grup ibu-ibu PKK, grup pemuda, grup petani, dan sebagainya. Dalam grup-grup ini, komunikasi politik berlangsung secara lebih informal dan personal, memungkinkan terciptanya deliberasi politik yang lebih substantif. Nur Afni tidak hanya menyebarkan informasi melalui grup-grup ini, tetapi juga aktif mendengarkan aspirasi dan masukan dari anggota grup, serta merespons pertanyaan dan kebutuhan mereka secara langsung.

TikTok, sebagai platform yang relatif baru tetapi sangat populer di kalangan generasi muda, dimanfaatkan oleh Nur Afni untuk menjangkau demografi yang sebelumnya sulit dijangkau melalui politik konvensional. TikTok memiliki karakteristik unik dengan format video pendek yang mengutamakan kreativitas dan nilai hiburan. Nur Afni mengadaptasi gaya komunikasi politiknya untuk sesuai dengan kultur TikTok, menciptakan konten-konten yang informatif tetapi juga engaging dan entertaining. Ia membuat video-video yang menjelaskan isu-isu politik dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, seringkali dengan menggunakan trend dan meme yang populer di TikTok. Strategi ini efektif dalam political education bagi generasi muda yang seringkali apatis terhadap politik.

Transformasi ruang publik melalui media sosial juga memungkinkan Nur Afni untuk mengatasi batasan-batasan struktural yang ada dalam ruang publik tradisional. Sebagai perempuan dalam konteks masyarakat patriarkal, Nur Afni seringkali menghadapi pembatasan akses terhadap ruang publik fisik tertentu. Media sosial menyediakan ruang alternatif di mana gender barrier menjadi less relevant, memungkinkan Nur Afni untuk berpartisipasi dalam diskusi politik dengan posisi yang lebih setara. Selain itu, media sosial juga memungkinkan Nur Afni untuk menjangkau audiences yang lebih luas dan diverse, tidak terbatas pada batasan geografis Kabupaten Enrekang.

Namun demikian, pemanfaatan ruang publik digital juga menghadapi berbagai tantangan dan limitasi. Salah satu tantangan utama adalah digital divide yang masih signifikan dalam masyarakat Indonesia, di mana tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital dan internet. Kondisi ini dapat menciptakan exclusion bagi kelompok-kelompok tertentu dari ruang publik digital. Nur Afni menyadari limitasi ini dan mengembangkan strategi hybrid yang mengombinasikan pendekatan digital dan konvensional untuk memastikan inklusivitas komunikasi politiknya.

Tantangan lain dalam ruang publik digital adalah fenomena echo chamber dan filter bubble yang dapat menyebabkan polarisasi politik. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan belief system pengguna, yang dapat membatasi exposure terhadap perspektif yang berbeda. Nur Afni berusaha mengatasi tantangan ini dengan secara aktif engage dengan critics dan opposing views, tidak hanya berkomunikasi dengan supporters. Ia juga berusaha membangun bridges across different communities dan demographic groups melalui content yang inclusive dan non-partisan pada isu-isu tertentu.

Aspek Autentitas sangat penting dalam strategi digital Nur Afni. Di era di mana kepercayaan publik pada politisi menurun, kemampuan untuk menampilkan kepribadian otentik adalah keunggulan kompetitif yang penting. Nur Afni telah berhasil membangun persona digital yang otentik dengan menampilkan kehidupan sehari-harinya, termasuk tantangan dan kerentanan, bukan hanya kisah sukses. Pendekatan ini menciptakan humanisasi politik yang membuat Nur Afni lebih mudah dipahami oleh audiens. Dia juga konsisten dalam nilai dan pesan di berbagai platform, membangun identitas politik yang koheren yang dapat dipercaya oleh publik.

3.3. Pembentukan Ruang Publik Alternatif: Strategi Counter-Hegemonic dalam Politik Gender

Konsep ruang publik alternatif atau "counterpublic" yang dikembangkan oleh Nancy Fraser (1990) menjadi sangat relevan dalam memahami strategi politik Nur Afni sebagai perempuan dalam konteks masyarakat patriarkal. Fraser berpendapat bahwa dalam masyarakat yang tidak setara, kelompok-kelompok subordinat memerlukan ruang publik alternatif untuk dapat mengembangkan identitas, kepentingan, dan counter-discourse yang berbeda dari mainstream public sphere. Nur Afni secara strategis menciptakan dan memanfaatkan berbagai bentuk ruang publik alternatif yang memberikan kesempatan bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya untuk berpartisipasi dalam politik dengan cara yang lebih inklusif dan empowering. Strategi ini tidak hanya efektif secara pragmatis, tetapi juga berkontribusi terhadap transformasi struktural dalam politik gender di tingkat lokal.

Pembentukan kelompok-kelompok diskusi perempuan merupakan salah satu inovasi penting dalam strategi ruang publik alternatif Nur Afni. Kelompok-kelompok ini dibentuk berdasarkan berbagai basis, seperti organisasi ibu-ibu PKK, kelompok arisan, komunitas pengajian perempuan, dan asosiasi profesi perempuan. Dalam kelompok-kelompok ini, perempuan dapat mendiskusikan isu-isu politik dengan lebih bebas dan comfortable, tanpa dominasi dari laki-laki yang seringkali terjadi dalam ruang publik mainstream. Nur Afni berperan sebagai catalyst yang memfasilitasi transformasi kelompok-kelompok sosial ini menjadi ruang deliberasi politik. Ia memperkenalkan agenda-agenda politik yang relevan dengan kepentingan perempuan, seperti isu kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, akses ekonomi, dan partisipasi politik perempuan.

Format diskusi dalam ruang publik alternatif perempuan ini dirancang untuk mengakomodasi karakteristik komunikasi perempuan yang cenderung lebih kolaboratif dan relasional dibandingkan kompetitif dan bertolak-belakang. Gilligan (1982) dalam teorinya tentang "different voice" menunjukkan bahwa perempuan cenderung menggunakan model moral reasoning yang berbeda dari laki-laki, dengan lebih menekankan care, relationship, dan responsibility. Nur Afni mengadaptasi Pemahaman ini dalam merancang format deliberasi politik yang lebih sesuai dengan karakteristik komunikasi perempuan. Diskusi-diskusi dilakukan dalam suasana yang informal dan suportif, dengan penekanan pada Berbagi pengalaman pribadi dan pemecahan masalah kolektif.

Strategi empowerment melalui pendidikan politik perempuan menjadi komponen utama dalam pembentukan ruang publik alternatif. Nur Afni menyadari bahwa salah satu halangan utama bagi partisipasi politik perempuan adalah kurangnya pengetahuan politik dan Kepercayaan. Untuk mengatasi hal ini, ia mengembangkan program-program pendidikan politik yang dirancang khusus untuk perempuan. Program-program ini mencakup workshop tentang sistem politik Indonesia, pelatihan public speaking, leadership training, dan advocacy skills. Pendekatan pendidikan yang digunakan adalah pembelajaran partisipatif dan pengalaman, di mana peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat secara aktif dalam simulasi dan latihan bermain peran.

Pembentukan jaringan ekonomi perempuan juga menjadi strategi penting dalam menciptakan ruang publik alternatif yang sustainable. Nur Afni memahami bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan prasyarat untuk pemberdayaan politik. Ia memfasilitasi pembentukan jaringan koperasi dan bisnis yang memungkinkan perempuan untuk mencapai Kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ini pada gilirannya memberikan perempuan lebih banyak sumber daya dan kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam politik. Jaringan ekonomi perempuan ini juga berfungsi sebagai platform untuk political mobilization, di mana isu-isu ekonomi dapat dikaitkan dengan agenda politik yang lebih luas.

Strategi alliance building dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil menjadi krusial dalam memperkuat ruang publik alternatif yang dibentuk oleh Nur Afni. Ia membangun kemitraan dengan berbagai Organisasi Masyarakat, organisasi perempuan, dan organisasi berbasis masyarakat yang memiliki concern terhadap isu-isu gender dan social justice. Aliansi ini tidak hanya memperluas Sumber daya dan kemampuan, tetapi juga memberikan legitimasi terhadap agenda politik perempuan. Melalui aliansi ini, isu-isu yang sebelumnya dianggap sebagai "women's issues" dapat diframing sebagai Masalah sosial yang lebih luas yang menjadi kepentingan publik secara umum. Kolaborasi dengan organisasi civil society juga memungkinkan Nur Afni untuk memanfaatkan jaringan dan keahlian yang ada dalam advokasi dan mobilisasi politik.

Transformasi ruang domestik menjadi political space merupakan strategi inovatif yang dikembangkan oleh Nur Afni untuk mengatasi Dikotomi antara private dan public sphere yang sering menjadi barrier bagi partisipasi politik perempuan. Dalam teori ruang publik klasik Habermas, terdapat pemisahan yang tegas antara private sphere (domestic realm) dan public sphere (political realm), di mana perempuan secara tradisional diasosiasikan dengan private sphere. Nur Afni menantang Dikotomi ini dengan menunjukkan bahwa isu-isu domestik sebenarnya memiliki dimensi politik yang penting. Misalnya, isu-isu seperti kesehatan anak, pendidikan, dan ekonomi rumah tangga dapat dikaitkan dengan kebijakan publik dan advokasi politik. Dengan cara ini, perempuan dapat masuk ke ranah politik melalui keahlian dan pengalaman mereka dalam ruang domestik.

Rekonstruksi naratif strategi juga menjadi elemen penting dalam pembentukan ruang publik alternatif. Nur Afni secara aktif berusaha mengubah narasi dominan tentang politik dan gender yang ada dalam masyarakat. Cerita yang menempatkan politik sebagai "dirty business" dan perempuan sebagai "pure beings" yang harus dijaga dari kontaminasi politik ditantang melalui narasi tandingan yang menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan justru dapat membawa pembersihan moral dan kepemimpinan transformatif dalam politik. Nur Afni juga membangun narrative tentang "political motherhood" yang menghubungkan traditional role perempuan sebagai pengasuh dengan tanggung jawab politik untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat ruang publik alternatif perempuan menunjukkan adaptasi Nur Afni terhadap perkembangan teknologi komunikasi kontemporer. Platform-platform seperti closed Facebook groups, WhatsApp groups, dan Telegram channels digunakan untuk membangun ruang aman bagi perempuan untuk berdiskusi tentang isu-isu politik sensitif. Platform digital ini memberikan anonimitas dan privasi yang memungkinkan perempuan untuk mengungkapkan pendapat mereka dengan lebih bebas, tanpa takut akan sanksi sosial. Nur Afni juga menggunakan digital platforms untuk mengadakan pertemuan yang dapat diakses oleh perempuan dari berbagai lokasi, mengatasi hambatan geografis untuk partisipasi.

Strategi Interseksionalitas dalam pembentukan ruang publik alternatif menunjukkan peduli Nur Afni terhadap kompleksitas identitas dan berbagai bentuk marginalisasi yang dihadapi oleh perempuan. Ia menyadari bahwa perempuan bukanlah kategori yang homogen, tetapi terdiri dari berbagai subkelompok dengan pengalaman dan kebutuhan yang berbeda. Dalam merancang ruang publik alternatif, Nur Afni berusaha mengakomodasi keragaman ini dengan memperhatikan persimpangan antara gender dengan kelas, etnis, usia, dan kategori sosial lainnya. Misalnya, ia membentuk grup tertentu untuk perempuan petani, perempuan pedagang, perempuan muda, dan perempuan dari latar belakang etnis yang berbeda, dengan program dan pendekatan yang dirancang untuk setiap kelompok.

Tantangan keberlanjutan merupakan isu kritis dalam pembentukan ruang publik alternatif. Berbeda dengan ruang publik arus utama yang memiliki dukungan dan sumber daya kelembagaan yang memadai, ruang publik alternatif sering mengandalkan partisipasi sukarela dan sumber daya yang terbatas. Nur Afni mengembangkan berbagai strategi untuk memastikan keberlanjutan, termasuk peningkatan kapasitas bagi pemimpin lokal yang dapat melanjutkan kegiatan kelompok setelah dia tidak lagi terlibat langsung. Dia juga berusaha untuk melembagakan praktik dan struktur yang telah didirikan di ruang publik alternatif, sehingga mereka dapat bertahan di luar kepemimpinan individu.

3.4. Komunikasi Deliberatif: Implementasi Prinsip Habermasian dalam Konteks Lokal

Penerapan prinsip komunikasi musyawarah Habermas dalam strategi politik Nur Afni menunjukkan adaptasi yang canggih terhadap kondisi lokal Kabupaten Enrekang yang memiliki karakteristik sosial budaya yang unik. Habermas (1984, 1987) dalam karyanya Teori Aksi Komunikatif mengembangkan konsep situasi ucapan ideal yang menjadi norma komunikasi yang bebas dari distorsi dan dominasi. Prinsip-prinsip ini meliputi: (1) semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara; (2) semua peserta dapat mempertanyakan klaim apa pun yang dibuat; (3) semua peserta dapat memperkenalkan topik baru; dan (4) semua peserta dapat mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan perasaan mereka. Nur Afni telah berhasil mengoperasionalkan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai pengaturan komunikasi politik, meskipun dengan adaptasi yang memperhitungkan konteks budaya dan kendala struktural yang ada.

Strategi mendengarkan aktif yang dikembangkan oleh Nur Afni mencerminkan komitmen terhadap prinsip rasionalitas komunikatif dalam etika wacana Habermas. Berbeda dengan politisi tradisional yang cenderung fokus pada persuasi dan manajemen kesan, Nur Afni mengembangkan gaya komunikasi yang benar-benar dialogis. Dalam setiap forum komunikasi, baik formal maupun informal, ia secara konsisten menunjukkan minat yang tulus dalam memahami perspektif dan kekhawatiran konstituen. Teknik mendengarkan aktif yang dia gunakan termasuk parafrase untuk memastikan pemahaman, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan menyediakan ruang untuk tanggapan yang rumit. Pendekatan ini tidak hanya efektif untuk membangun kepercayaan dan hubungan, tetapi juga memungkinkan Nur Afni untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang sebenarnya.

Praktik argumentasi yang dikembangkan oleh Nur Afni menunjukkan kepatuhan pada standar rasionalitas yang ditekankan oleh Habermas. Dalam etika wacana, Habermas menekankan pentingnya mendasarkan posisi politik pada argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, tidak hanya pada daya tarik emosional atau posisi kekuasaan. Nur Afni secara konsisten berupaya untuk menghadirkan posisi kebijakan dan pandangan politik dengan bukti pendukung dan penalaran logis. Ketika mengadvokasi kebijakan atau program tertentu, ia tidak hanya menyatakan apa yang harus dilakukan, tetapi juga menjelaskan mengapa hal itu harus dilakukan, dengan mengacu pada data, praktik terbaik dari tempat lain, dan dampak potensial. Pendekatan ini membantu mengangkat tingkat wacana politik di Kabupaten Enrekang dari yang sebelumnya sering didominasi oleh serangan pribadi dan janji-janji kosong.

Penerapan prinsip inklusivitas dalam strategi komunikasi Nur Afni menunjukkan upaya serius untuk menciptakan ruang bagi semua suara dalam musyawarah politik. Habermas menegaskan bahwa keputusan politik yang sah harus muncul dari musyawarah inklusif yang melibatkan semua pihak yang terdampak. Nur Afni mengembangkan berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa kelompok marjinal dan suara minoritas dapat berpartisipasi dalam diskusi politik. Ini termasuk membuat forum khusus untuk kelompok demografis yang berbeda, menggunakan berbagai bahasa untuk mengakomodasi keragaman linguistik, dan mengadaptasi format komunikasi untuk orang-orang dengan tingkat pendidikan dan literasi yang berbeda. Ini juga secara aktif menjangkau kelompok-kelompok yang secara tradisional dikecualikan dari proses politik, seperti penyandang disabilitas, orang tua, dan masyarakat adat.

Strategi penyelesaian konflik yang dikembangkan oleh Nur Afni mencerminkan penerapan prinsip Habermasian dalam mengelola perselisihan dan ketegangan yang mau tidak mau muncul dalam musyawarah politik. Habermas berpendapat bahwa konflik dapat diselesaikan melalui wacana rasional yang berfokus pada pencarian kesamaan dan saling pengertian. Ketika menghadapi ketidaksepakatan atau kritik, Nur Afni tidak menggunakan pendekatan defensif atau konfrontatif, tetapi mencoba memahami kekhawatiran yang mendasari dan menemukan cara untuk mengatasinya. Dia juga mempromosikan budaya ketidaksepakatan yang menghormati di forum yang dia fasilitasi, mendorong peserta untuk terlibat dengan ide daripada menyerang orang.

Pendekatan membangun konsensus yang diadopsi oleh Nur Afni menunjukkan komitmen terhadap cita-cita demokrasi yang ditekankan dalam etika wacana Habermasian. Alih-alih menggunakan mekanisme pemungutan suara mayoritas-minoritas yang dapat meminggirkan suara-suara yang berbeda pendapat, Nur Afni berupaya memfasilitasi proses yang mengarah pada konsensus atau setidaknya saling pengertian. Dalam pertemuan masyarakat dan diskusi forum, ia memfasilitasi diskusi berkepanjangan yang memungkinkan semua peserta untuk mengekspresikan pandangan mereka dan bekerja sama untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Ketika konsensus lengkap tidak memungkinkan, ia berusaha untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Praktik transparansi yang dikembangkan oleh Nur Afni mencerminkan penekanan Habermasian pada prinsip publisitas dalam pemerintahan yang demokratis. Habermas berpendapat bahwa legitimasi demokrasi menuntut bahwa keputusan politik dapat dibenarkan kepada publik melalui proses yang terbuka dan transparan. Nur Afni secara konsisten berupaya menjaga transparansi dalam segala aspek kegiatan politik. Ini termasuk secara terbuka berbagi informasi tentang sumber pendanaan untuk kegiatan kampanye, secara teratur melaporkan kembali kepada konstituen tentang kegiatan legislatif dan posisi pemungutan suara, dan memberikan penjelasan yang jelas untuk posisi dan keputusan kebijakan. Inisiatif transparansi ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga memungkinkan partisipasi warga negara yang lebih terinformasi dalam proses politik.

Strategi komunikasi pemberdayaan yang dikembangkan oleh Nur Afni menunjukkan pemahaman tentang potensi emansipatoris dari aksi komunikatif. Habermas berpendapat bahwa komunikasi sejati memiliki potensi untuk membebaskan orang dari dominasi dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan kapasitas mereka sebagai agen otonom. Dalam interaksi dengan konstituen, Nur Afni tidak hanya memberikan informasi atau mencari dukungan, tetapi juga secara aktif berupaya memberdayakan masyarakat untuk menjadi aktor politik yang lebih efektif. Ini termasuk memberikan pendidikan kewarganegaraan, berbagi keterampilan untuk advokasi politik, dan mendorong orang untuk mengambil peran kepemimpinan di komunitas mereka.

Penerapan pedagogi dialogis dalam inisiatif pendidikan politik menunjukkan pengaruh tradisi pedagogi kritis yang sesuai dengan pendekatan komunikatif Habermasian. Terinspirasi oleh karya-karya Paulo Freire dan pendidik kritis lainnya, Nur Afni mengembangkan pendekatan pendidikan yang memperlakukan peserta sebagai rekan peneliti daripada penerima informasi pasif. Dalam lokakarya dan sesi pelatihan, peserta didorong untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, menganalisis secara kritis kondisi sosial mereka, dan mengembangkan strategi kolektif untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi.

3.5. Analisis Kritis: Hambatan Struktural dan Limitasi Ruang Publik

Meskipun strategi politik Nur Afni menunjukkan implementasi yang mengesankan terhadap prinsip-prinsip ruang publik Habermasian, analisis kritis juga mengungkapkan berbagai hambatan dan keterbatasan struktural yang mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan upaya tersebut. Kritik terhadap teori ruang publik Habermas, khususnya yang dikembangkan oleh sarjana feminis seperti Nancy Fraser (1990), Seyla Benhabib (1992), dan Iris Marion Young (2000), memberikan lensa teoretis penting untuk memahami keterbatasan dan kontradiksi yang melekat dalam penerapan cita-cita Habermasia dalam konteks politik dunia nyata. Analisis ini tidak bertujuan untuk melemahkan pencapaian Nur Afni, melainkan untuk memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang kompleksitas dan tantangan dalam menciptakan komunikasi politik yang inklusif dan demokratis.

Struktur patriarki dalam masyarakat Enrekang merupakan kendala mendasar yang mempengaruhi semua aspek partisipasi politik perempuan, termasuk upaya Nur Afni untuk menciptakan ruang publik yang inklusif. Terlepas dari kesetaraan hukum formal dan retorika resmi tentang kesetaraan gender, norma-norma budaya dan praktik sosial yang tertanam dalam terus mengutamakan suara laki-laki dan meminggirkan perempuan dalam wacana politik. Manifestasi dominasi patriarki dapat dilihat dalam berbagai bentuk, mulai dari agresi mikro halus di forum publik hingga bentuk pengucilan dan pembungkaman yang lebih terbuka. Misalnya, dalam diskusi publik, kontribusi perempuan sering dianggap "emosional" atau "tidak cukup serius", sedangkan kontribusi laki-laki secara otomatis diberikan lebih banyak kredibilitas dan otoritas.

Ketimpangan ekonomi menciptakan hambatan tambahan untuk partisipasi yang setara di ruang publik yang dibangun oleh Nur Afni. Habermas dalam konsepsi asli ruang publik borjuis mengasumsikan bahwa peserta memiliki kemandirian ekonomi dan waktu luang untuk terlibat dalam musyawarah politik. Namun, dalam realitas masyarakat pedesaan Indonesia, banyak warga negara, khususnya perempuan, berjuang dengan kelangsungan hidup ekonomi dasar yang menyisakan sedikit waktu atau energi untuk partisipasi politik. Perempuan di Enrekang, seperti di banyak daerah pedesaan lainnya, sering menanggung beban pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab perawatan yang tidak proporsional, yang membatasi ketersediaan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kendala ekonomi juga mempengaruhi kualitas partisipasi, karena orang-orang yang berjuang secara ekonomi mungkin merasa enggan untuk mengekspresikan pandangan yang dapat membahayakan hubungan ekonomi mereka dengan elit lokal.

Kesenjangan pendidikan menciptakan tantangan tambahan untuk menerapkan proses deliberatif yang benar-benar inklusif. Model musyawarah rasional mengasumsikan peserta yang memiliki keterampilan literasi yang memadai dan keakraban dengan mode argumen dan penalaran formal. Namun, dalam konteks di mana kesempatan pendidikan secara historis terbatas, terutama bagi perempuan dan komunitas yang terpinggirkan, asumsi ini mungkin tidak berlaku. Nur Afni berusaha mengakomodasi berbagai tingkat pendidikan melalui penggunaan berbagai format komunikasi dan bahasa, tetapi ketidaksetaraan mendasar dalam modal budaya terus mempengaruhi kualitas dan kesetaraan partisipasi dalam wacana politik.

Konservatisme agama dan budaya dalam masyarakat Enrekang menciptakan ketegangan dengan beberapa aspek cita-cita ruang publik yang inklusif. Sementara Nur Afni telah berhasil mengintegrasikan ruang keagamaan ke dalam strategi komunikasi politik, ia juga harus menavigasi kendala yang dipaksakan oleh interpretasi agama konservatif yang membatasi peran publik perempuan. Kontradiksi antara prinsip-prinsip Islam tentang kesetaraan gender dan praktik budaya patriarki menciptakan medan yang kompleks untuk partisipasi politik perempuan. Nur Afni harus hati-hati menyeimbangkan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama dengan advokasi hak-hak politik perempuan, yang terkadang membutuhkan kompromi strategis yang dapat membatasi ruang lingkup aksi politik transformatif.

Institutional constraints within formal political system juga membatasi efektivitas dari inisiatif ruang publik akar rumput. Meskipun berhasil membangun jaringan komunikasi partisipatif, Nur Afni masih beroperasi dalam lembaga politik formal yang mungkin tidak sepenuhnya responsif terhadap masukan dari musyawarah warga. Partai politik, sistem pemilu, dan birokrasi pemerintah memiliki logika dan kendala yang mungkin bertentangan dengan prinsip demokrasi deliberatif. Misalnya, disiplin partai dapat membatasi kemampuan dari perwakilan rakyat terpilih untuk bertindak pada konsensus yang muncul dari musyawarah warga, dan prosedur birokrasi mungkin tidak mengakomodasi masukan partisipatif dalam proses pembuatan kebijakan.

Kesenjangan digital menciptakan bentuk baru dari pengecualian dalam ruang publik kontemporer. Sementara teknologi digital menawarkan peluang baru untuk komunikasi politik inklusif, mereka juga menciptakan hambatan baru bagi mereka yang kurang memiliki akses kepada teknologi atau keterampilan literasi digital. Dalam Kabupaten Enrekang, disparities dalam internet access, smartphone ownership, dan digital skills berarti bahwa ruang publik digital yang dibuat melalui platform media sosial dapat secara tidak sengaja mengecualikan kelompok tertentu, terutama orang tua, orang dengan penghasilan rendah, dan mereka yang berada di daerah pedesaan terpencil. Kesenjangan digital ini dapat mereproduksi dan memperkuat ketidaksetaraan yang ada daripada mengatasinya.

Representasi media dan kualitas wacana publik juga menghadirkan tantangan yang berkelanjutan. Narasi media dominan tentang politik dan gender terus mencerminkan asumsi patriarki dan stereotip, yang dapat merusak efek dari upaya akar rumput untuk menciptakan wacana politik yang lebih inklusif. Liputan berita dari politisi perempuan sering memfokuskan pada penampilan, status keluarga, atau karakteristik pribadi daripada posisi kebijakan dan kemampuan politik. Algoritma media sosial yang memprioritaskan konten sensasional daripada diskusi substantif juga dapat mendistorsi kualitas wacana publik dalam platform digital.

Scale dan sustainability issues represent a long-term challenges for initiatives yang developed by Nur Afni. Menciptakan ruang publik yang inklusif membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang signifikan untuk dipertahankan. Sebagai politisi individu, Nur Afni memiliki kapasitas terbatas untuk mempertahankan semua inisiatif yang telah didirikan, terutama seiring dengan meningkatnya tanggung jawab resminya. Membangun kapasitas kelembagaan untuk melanjutkan pekerjaan ini di luar kepemimpinan individu membutuhkan perubahan sistemik yang mungkin sulit untuk dicapai dalam jangka pendek. Selain itu, meningkatkan keberhasilan lokal ke tingkat yang lebih luas dapat menghadapi berbagai jenis resistensi dan hambatan.

3.6. Transformasi Legitimasi Politik: Dari Kharisma Personal Menuju Legitimasi Diskursif

Analisis perjalanan politik Nur Afni mengungkapkan transformasi signifikan dalam dasar legitimasi politiknya, dari awalnya bergantung pada karisma pribadi dan bentuk otoritas tradisional menjadi legitimasi yang didasarkan pada wacana dan proses partisipatif. Transformasi ini memiliki implikasi penting untuk memahami bagaimana legitimasi demokrasi dapat dibangun dan dipertahankan dalam konteks di mana bentuk otoritas politik tradisional masih dominan. Habermas (1996) dalam *Between Facts and Norms* mengembangkan konsep legitimasi diskursif yang menekankan bahwa otoritas politik dalam masyarakat demokratis harus didasarkan pada proses musyawarah publik dan wacana rasional, bukan pada sumber otoritas tradisional atau karismatik.

Fase awal karir politik Nur Afni sebagian besar mengandalkan bentuk-bentuk legitimasi yang dapat dicirikan sebagai kombinasi otoritas karismatik dan tradisional dalam pengertian Weberia. Kualitas pribadi seperti keterampilan artikulasi, latar belakang pendidikan, dan koneksi keluarga memberikan dasar untuk masuknya dia ke arena politik. Modal budaya yang berasal dari aktivismenya dalam organisasi perempuan dan komunitas keagamaan juga berkontribusi pada pengakuan dan dukungan awal. Namun, bentuk-bentuk legitimasi ini, meskipun penting untuk membangun kredibilitas, tidak cukup untuk mempertahankan efektivitas politik jangka panjang dalam konteks meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan responsivitas perwakilan politik.

Transisi menuju legitimasi diskursif dimulai dengan pengakuan Nur Afni bahwa dukungan politik berkelanjutan membutuhkan dialog dan keterlibatan berkelanjutan dengan konstituen daripada mobilisasi berkala selama periode pemilu. Realisasi ini mengarah kepada upaya sistematis untuk menciptakan kesempatan rutin untuk musyawarah publik dan umpan balik. Alih-alih mengandalkan strategi komunikasi top-down yang khas dalam pendekatan politik tradisional, dia mulai mengembangkan proses konsultasi bottom-up yang memungkinkan warga untuk mempengaruhi agenda kebijakan dan prioritas legislatif. Pergeseran ini mewakili gerakan dari apa yang disebut Habermas sebagai "tindakan strategis" yang berorientasi pada kesuksesan dan akuisisi kekuasaan, kepada "tindakan komunikatif" yang berorientasi pada saling pengertian dan pembangunan konsensus.

Pelembagaan dari proses partisipatif merupakan langkah penting dalam membangun legitimasi diskursif. Nur Afni mengadakan "sesi mendengarkan" secara teratur di berbagai komunitas di seluruh konstituensinya, di mana warga dapat menyampaikan keprihatinan, mengusulkan solusi, dan terlibat dalam diskusi substantif tentang masalah kebijakan. Sesi-sesi ini disusun untuk mendorong musyawarah rasional daripada seruan emosional atau keluhan pribadi. Aturan dasar ditetapkan untuk memastikan dialog yang saling menghormati, argumen berbasis bukti, dan partisipasi inklusif. Seiring waktu, sesi-sesi ini menjadi praktik yang diharapkan yang diandalkan oleh konstituen untuk mempengaruhi keputusan politik.

Dokumentasi dan praktik transparansi yang dikembangkan oleh Nur Afni berkontribusi secara signifikan kepada membangun legitimasi diskursif. Semua keputusan besar, posisi kebijakan, dan suara legislatif disertai dengan penjelasan terperinci yang menguraikan proses penalaran dan pertimbangan yang mempengaruhi pilihannya. Ketika masukan konstituen bertentangan dengan posisi awalnya, dia memberikan penjelasan publik tentang bagaimana dia menimbang perspektif yang berbeda dan sampai pada keputusan akhir. Tingkat transparansi ini tidak biasa dalam konteks politik Indonesia, di mana keputusan politik sering dibuat tanpa pembenaran publik yang terperinci. Praktik transparansi tidak hanya membangun kepercayaan tetapi juga memungkinkan partisipasi warga yang lebih terinformasi dalam pertimbangan yang sedang berlangsung.

Lingkaran umpan balik antara masukan konstituen dan tindakan legislatif menunjukkan dampak nyata dari proses partisipatif, sehingga memperkuat legitimasi dari pendekatan deliberatif. Nur Afni secara sistematis melacak saran dan rekomendasi yang muncul dari konsultasi publik dan memberikan pembaruan rutin tentang bagaimana masukan ini memengaruhi pekerjaan legislatifnya. Ketika proposal kebijakan spesifik yang berasal dari musyawarah warga berhasil dilaksanakan, ini memberikan bukti nyata bahwa proses partisipatif dapat membuahkan hasil yang berarti. Kisah sukses membantu membangun momentum dan meningkatkan investasi warga dalam proses musyawarah.

Proses pengembangan kebijakan kolaboratif mewakili konstruksi legitimasi diskursif tingkat yang paling canggih. Alih-alih mengembangkan posisi kebijakan secara mandiri dan kemudian mencari dukungan publik, Nur Afni mulai melibatkan warga negara dalam pengembangan kolaboratif dari proposal kebijakan. Ini melibatkan pengorganisasian kelompok kerja tentang isu-isu tertentu, menyatukan beragam pemangku kepentingan untuk meneliti masalah dan mengembangkan solusi, dan memfasilitasi proses pembangunan konsensus yang dapat menginformasikan inisiatif legislatif. Proses kolaboratif ini tidak hanya menghasilkan kebijakan yang lebih terinformasi, tetapi juga menciptakan kepemilikan dan dukungan berbasis luas untuk inisiatif yang dihasilkan.

Perluasan jaringan deliberatif di luar konstituen terdekat menunjukkan peningkatan prinsip-prinsip legitimasi diskursif. Nur Afni mulai memfasilitasi koneksi antara kelompok musyawarah lokal dan inisiatif serupa di daerah lain, menciptakan peluang untuk berbagi pengalaman dan belajar dari konteks lain. Dia juga bekerja untuk membangun koneksi antara proses musyawarah akar rumput dan lembaga pembuatan kebijakan formal di tingkat regional dan nasional. Upaya jejaring ini membantu memperkuat suara lokal dalam percakapan kebijakan yang lebih luas dan menunjukkan relevansi dari pendekatan partisipatif untuk tantangan tata kelola skala besar.

Kegiatan mentorship dan pengembangan kapasitas mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan dari legitimasi diskursif di luar karir politik individu. Menyadari bahwa legitimasi demokrasi tidak dapat bergantung tanpa batas waktu pada individu tertentu, Nur Afni menginvestasikan waktu yang signifikan dalam melatih aktor politik lain dalam keterampilan kepemimpinan deliberatif. Ini termasuk membimbing politisi perempuan lainnya, melatih tokoh masyarakat dalam teknik fasilitasi, dan bekerja dengan organisasi masyarakat sipil untuk membangun kapasitas kelembagaan untuk mendukung inisiatif tata kelola partisipatif. Upaya ini mencerminkan pemahaman bahwa legitimasi diskursif membutuhkan dukungan kelembagaan dan perubahan budaya yang melampaui kepemimpinan individu.

Namun, ketegangan antara legitimasi diskursif dan kendala politik praktis tetap menjadi tantangan yang berkelanjutan. Sementara proses partisipatif memberikan landasan yang kuat untuk akuntabilitas demokratis, mereka juga dapat memakan waktu dan terkadang menghasilkan rekomendasi yang bertentangan dengan realitas politik atau posisi partai. Menyeimbangkan komitmen kepada prinsip-prinsip deliberatif dengan kebutuhan praktis untuk tindakan politik yang efektif membutuhkan negosiasi berkelanjutan dan pengambilan keputusan strategis. Nur Afni telah mengembangkan keterampilan canggih dalam mengelola ketegangan ini tanpa mengorbankan komitmen mendasar kepada tata kelola partisipatif.

3.7. Dampak Transformatif: Perubahan Lanskap Politik Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat

Penerapan strategi ruang publik deliberatif oleh Nur Afni telah menghasilkan dampak transformatif yang signifikan terhadap lanskap politik lokal di Kabupaten Enrekang dan memberikan model pemberdayaan politik yang dapat diterapkan dalam konteks yang sama. Transformasi ini tidak hanya terlihat dari segi keberhasilan pemilu, tetapi yang lebih penting dalam perubahan budaya politik, pola keterlibatan warga, dan kualitas wacana publik. Analisis dampak ini memberikan wawasan berharga untuk memahami potensi pendekatan Habermasian terhadap pemerintahan demokratis dalam konteks negara berkembang dan khususnya dalam komunitas yang secara historis dicirikan oleh hubungan sosial hierarkis dan partisipasi politik yang terbatas.

Perubahan budaya politik adalah salah satu dampak paling signifikan dari inisiatif Nur Afni. Budaya politik tradisional di Kabupaten Enrekang, seperti di banyak masyarakat pedesaan Indonesia, secara historis ditandai dengan penghormatan kepada otoritas, pertanyaan terbatas terhadap keputusan politik, dan penerimaan pendekatan pemerintahan top-down. Melalui pemodelan praktik deliberatif yang konsisten dan menciptakan peluang untuk keterlibatan warga yang bermakna, Nur Afni telah berkontribusi pada pergeseran bertahap menuju budaya politik yang lebih partisipatif. Warga menjadi lebih terbiasa mengharapkan peluang untuk masukan dalam keputusan politik, dan politisi mulai merasakan tekanan untuk lebih responsif dan bertanggung jawab terhadap kekhawatiran konstituen.

Peningkatan kemandirian politik di antara warga negara, terutama perempuan, merupakan dampak transformatif penting lainnya. Political efficacy mengacu pada keyakinan warga negara bahwa mereka dapat memahami politik dan bahwa partisipasi politik mereka dapat membuat perbedaan dalam kebijakan pemerintah dan hasil. Penelitian dalam psikologi politik menunjukkan bahwa kemandirian politik sangat penting untuk mempertahankan partisipasi demokratis. Sebelum inisiatif musyawarah Nur Afni, banyak warga dalam Kabupaten Enrekang, khususnya perempuan, melaporkan merasa bahwa politik berada di luar pemahaman atau pengaruh mereka. Melalui proses partisipatif yang memberikan pengalaman konkret dari keterlibatan politik yang sukses, banyak warga negara telah mengembangkan kepercayaan diri yang meningkat dalam kemampuan mereka untuk memahami masalah politik dan mempengaruhi hasil politik.

Hasil peningkatan kapasitas dalam organisasi masyarakat sipil menunjukkan dimensi lain dari dampak transformatif. LSM lokal, kelompok perempuan, dan organisasi masyarakat telah mendapat manfaat dari pelatihan dan peluang kolaborasi yang disediakan dalam konteks inisiatif deliberatif. Organisasi-organisasi ini telah mengembangkan keterampilan yang ditingkatkan dalam advokasi, penelitian, fasilitasi, dan keterlibatan politik. Penguatan kapasitas masyarakat sipil telah menciptakan ekosistem yang lebih kuat untuk mendukung pemerintahan demokratis yang melampaui karir politik individu. Beberapa organisasi sekarang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan konsultasi warga, melakukan penelitian kebijakan, dan mengadvokasi kepentingan masyarakat di berbagai arena pemerintahan.

Inovasi kebijakan dan peningkatan dalam tata kelola lokal mewakili hasil nyata dari pendekatan partisipatif. Inisiatif kebijakan spesifik yang muncul dari musyawarah warga telah berhasil dilaksanakan dan telah menunjukkan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Contohnya termasuk peningkatan dalam layanan kesehatan ibu yang dihasilkan dari kelompok advokasi kesehatan perempuan, proyek infrastruktur yang memprioritaskan kebutuhan yang diidentifikasi masyarakat, dan inisiatif pembangunan ekonomi yang dibangun di atas aset dan kemampuan lokal. Keberhasilan kebijakan konkret ini telah memvalidasi efektivitas dari pendekatan partisipatif dan telah mendorong keterlibatan warga yang berkelanjutan dalam proses politik.

Efek riak di luar konstituen langsung menunjukkan peningkatan dampak transformatif. Politisi lain di wilayah telah mulai mengadopsi pendekatan partisipatif serupa dalam respons kepada menunjukkan keberhasilan dari inisiatif Nur Afni. Instansi pemerintah daerah telah mulai untuk memasukkan proses konsultasi warga dalam pengembangan kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil di kabupaten tetangga telah meminta pelatihan dalam teknik fasilitasi musyawarah. Lembaga akademik telah mulai mempelajari inisiatif tata kelola partisipatif sebagai model untuk meningkatkan praktik demokrasi. Efek riak ini menunjukkan bahwa transformasi lokal dapat berkontribusi pada inovasi demokratis yang lebih luas.

Dampak antargenerasi pada sosialisasi politik mewakili potensi transformatif jangka panjang dari inisiatif deliberatif. Kaum muda yang telah berpartisipasi dalam atau mengamati proses politik partisipatif mengembangkan harapan yang berbeda tentang keterlibatan politik dan keterampilan yang berbeda untuk partisipasi demokratis. Penelitian sosialisasi politik menunjukkan bahwa pengalaman awal dengan partisipasi politik secara signifikan mempengaruhi pola seumur hidup dari keterlibatan sipil. Pemuda yang telah tumbuh dengan eksposur kepada proses deliberatif lebih cenderung mengharapkan peluang untuk partisipasi yang bermakna dalam konteks politik masa depan dan lebih cenderung memiliki keterampilan yang diperlukan untuk keterlibatan demokratis yang efektif.

Transformasi dinamika gender dalam arena politik menunjukkan dampak spesifik pada partisipasi politik perempuan. Pendekatan partisipatif Sukses dari Nur Afni telah mendorong perempuan lain untuk mempertimbangkan karir politik dan telah menunjukkan kelayakan dari pendekatan alternatif kepada strategi kampanye kompetitif tradisional. Organisasi perempuan menjadi lebih aktif secara politik dan lebih canggih dalam strategi advokasi mereka. Politisi laki-laki telah mulai mengakui nilai kontribusi perempuan dalam wacana politik dan telah menjadi lebih mendukung partisipasi politik perempuan. Sementara kesetaraan gender dalam politik jauh dari tercapai, kemajuan yang jelas telah dibuat dalam mengubah sikap dan peluang.

Hasil pemberdayaan ekonomi menunjukkan hubungan antara partisipasi politik dan pembangunan ekonomi. Proses partisipatif telah mengidentifikasi dan mengatasi kendala ekonomi yang sebelumnya terbatas pembangunan masyarakat. Pengembangan kebijakan kolaboratif telah menghasilkan inisiatif ekonomi yang lebih selaras dengan aset dan prioritas masyarakat. Peningkatan partisipasi politik perempuan telah menyebabkan perhatian yang lebih besar kepada isu-isu ekonomi yang secara khusus mempengaruhi perempuan, seperti akses pasar, ketersediaan kredit, dan dukungan pengasuhan anak. Pemberdayaan ekonomi, pada gilirannya, memungkinkan peningkatan partisipasi politik dengan menyediakan sumber daya dan waktu yang diperlukan untuk melibatkan dalam kegiatan sipil.

Namun, tantangan keberlanjutan tetap menjadi perhatian yang signifikan untuk mempertahankan dampak transformatif dari waktu ke waktu. Banyak inovasi sangat bergantung pada kepemimpinan berkelanjutan dari individu-individu kunci, menciptakan kerentanan ketika orang-orang tersebut meninggalkan kantor publik atau mengarahkan energi mereka. Perubahan kelembagaan yang diperlukan untuk mendukung tata kelola partisipatif membutuhkan advokasi berkelanjutan dan sumber daya yang mungkin tidak tersedia secara konsisten. Tekanan politik eksternal atau krisis ekonomi dapat merusak komitmen terhadap pendekatan deliberatif yang mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Membangun infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung partisipasi demokratis membutuhkan komitmen jangka panjang dan inovasi berkelanjutan dalam mengatasi tantangan yang muncul.

4. Conclusion

Analisis terhadap strategi politik Nur Afni dalam konteks teori ruang publik Jürgen Habermas mengungkapkan kompleksitas dan potensi transformatif dari implementasi prinsip-prinsip demokratis deliberatif dalam setting politik lokal Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun konsep ruang publik Habermas dikembangkan dalam konteks masyarakat Barat yang berbeda secara signifikan dari realitas sosial-budaya Indonesia, prinsip-prinsip dasarnya dapat diadaptasi dan diimplementasikan secara efektif dengan mempertimbangkan karakteristik lokal yang spesifik. Keberhasilan Nur Afni dalam menciptakan dan memanfaatkan berbagai bentuk ruang publik - tradisional, digital, dan alternatif - memberikan bukti empiris bahwa transformasi demokratis dapat dimulai dari level akar rumput melalui praktik komunikasi yang inklusif dan partisipatif.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa strategi multi-dimensional yang mengombinasikan pemanfaatan ruang publik tradisional, inovasi digital, dan pembentukan ruang publik alternatif dapat secara efektif mengatasi hambatan struktural yang dihadapi oleh kelompok marginal dalam partisipasi politik. Pendekatan Nur Afni dalam mentransformasi ruang-ruang sosial yang sudah ada menjadi arena deliberasi politik, sambil secara bersamaan menciptakan ruang-ruang baru yang lebih inklusif, mendemonstrasikan kreativitas dan adaptabilitas yang diperlukan untuk demokratisasi dalam konteks masyarakat yang masih terstruktur secara hierarkis. Transformasi dari legitimasi berbasis kharisma personal menuju legitimasi diskursif yang diperoleh melalui proses deliberatif yang berkelanjutan menunjukkan evolusi menuju bentuk kepemimpinan politik yang lebih demokratis dan akuntabel.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman tentang aplikabilitas teori ruang publik Habermas dalam konteks non-Barat yang ditandai oleh pluralitas kultural, ketidaksetaraan struktural, dan proses demokratisasi yang masih berlangsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa kritik-kritik feminis terhadap konsep ruang publik Habermas, khususnya konsep "counterpublic" Nancy Fraser, sangat relevan dan necessary dalam memahami strategi politik kelompok marginal. Integrasi antara ruang publik mainstream dan alternatif dalam strategi politik Nur Afni memberikan model untuk Inklusi politik yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dibandingkan pendekatan yang hanya fokus pada satu bentuk ruang publik.

Implikasi praktis dari penelitian ini significant untuk pengembangan strategi politik yang lebih inklusif dan demokratis, khususnya bagi politisi perempuan dan kelompok marginal lainnya. Model komunikasi deliberatif yang dikembangkan oleh Nur Afni dapat diadaptasi dan direplikasi dalam konteks politik lokal lainnya, dengan penyesuaian terhadap karakteristik sosial-budaya

yang spesifik. Demonstrasi bahwa teknologi digital dapat diintegrasikan secara efektif dengan bentuk-bentuk komunikasi tradisional untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas deliberasi politik memberikan wawasan yang berharga untuk praktisi politik dalam era digital.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai limitasi dan tantangan yang inherent dalam implementasi prinsip-prinsip ruang publik ideal dalam realitas politik yang kompleks. Hambatan struktural seperti ketidaksetaraan ekonomi, disparitas pendidikan, dan persistennya nilai-nilai keberlanjutan patriarkhi untuk mempengaruhi kualitas dan inklusivitas deliberasi politik. Kesenjangan digital dan pemfilteran konten berbasis algoritme dalam platform media sosial menciptakan bentuk-bentuk pengecualian baru yang memerlukan perhatian khusus dalam merancang strategi komunikasi inklusif. Keberlanjutan dari inisiatif-inisiatif partisipatoris tetap menantang dalam ketiadaan dukungan kelembagaan yang memadai dan perubahan budaya yang lebih komprehensif.

Untuk penelitian di masa depan, beberapa arah yang menjanjikan dapat diidentifikasi. Studi komparatif yang menganalisis implementasi prinsip-prinsip ruang publik deliberatif dalam berbagai konteks budaya dan kelembagaan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan inisiatif demokratisasi. Studi longitudinal yang melacak dampak inisiatif tata kelola partisipatif selama periode waktu yang lebih lama dapat membantu dalam memahami tantangan keberlanjutan dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Penelitian yang berfokus pada mekanisme khusus untuk mengatasi kesenjangan digital dan memastikan akses inklusif ke ruang publik digital akan semakin penting karena komunikasi politik menjadi lebih dimediasi secara digital.

Selain itu, penyelidikan terhadap persimpangan antara demokrasi deliberatif dan bentuk partisipasi politik lainnya, seperti gerakan protes, kampanye advokasi, dan aktivisme elektoral, dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang ekosistem keterlibatan demokratis. Penelitian yang meneliti bagaimana inisiatif deliberatif dapat ditingkatkan dari tingkat lokal ke regional atau nasional tanpa kehilangan karakter partisipatifnya juga merupakan area penting untuk penyelidikan di masa depan. Akhirnya, studi yang mengeksplorasi potensi untuk menggabungkan bentuk pengambilan keputusan kolektif pribumi atau tradisional dengan praktik demokrasi deliberatif modern dapat berkontribusi untuk mengembangkan model yang lebih sesuai secara budaya untuk pemerintahan demokratis dalam masyarakat yang beragam.

Dalam konteks Indonesia yang lebih luas, temuan penelitian ini relevan untuk upaya berkelanjutan untuk memperkuat institusi dan praktik demokrasi di era pasca-reformasi. Demonstrasi bahwa inovasi demokrasi tingkat akar rumput dapat menghasilkan perubahan yang berarti dalam budaya politik dan praktik pemerintahan memberikan dorongan untuk eksperimen berkelanjutan dengan pendekatan partisipatif. Namun, temuan ini juga menyoroti perlunya dukungan sistemik untuk inisiatif demokrasi lokal, termasuk reformasi kelembagaan yang membuat sistem politik formal lebih responsif terhadap masukan warga dan investasi dalam pendidikan kewarganegaraan yang membangun kemampuan untuk partisipasi demokratis di semua segmen masyarakat.

Signifikansi dari kasus Nur Afni melampaui konteks langsungnya kepada diskusi yang lebih luas tentang gender, politik, dan demokratisasi di negara-negara berkembang. Success dalam menggabungkan tindakan politik strategis dengan komitmen kepada prinsip-prinsip demokrasi memberikan model untuk kepemimpinan politik yang dapat berkontribusi kepada keberhasilan elektoral individu dan transformasi sosial yang lebih luas. Adaptasi dari prinsip Habermasian

kepada konteks lokal menunjukkan kemungkinan untuk menarik cita-cita demokrasi universal sambil menghormati kekhususan budaya dan sistem pengetahuan lokal.

Pada akhirnya, penelitian ini berkontribusi pada badan keilmuan yang berkembang yang berusaha memahami bagaimana cita-cita demokrasi dapat direalisasikan dalam praktik melalui adaptasi kreatif terhadap kondisi lokal dan komitmen yang gigih terhadap tata kelola yang inklusif dan partisipatif. Meskipun tantangan tetap signifikan, kasus Nur Afni memberikan contoh konkret potensi transformatif yang melekat dalam pendekatan demokrasi deliberatif ketika diimplementasikan dengan kecanggihan strategis dan komitmen berkelanjutan terhadap prinsip kesetaraan, inklusi, dan saling menghormati dalam wacana politik. Seiring dengan perkembangan Indonesia sebagai masyarakat demokratis, pelajaran dari inovasi tingkat lokal seperti yang ditunjukkan oleh Nur Afni akan sangat penting untuk menginformasikan reformasi demokrasi berskala besar dan upaya pembangunan lembaga.

References

- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi perempuan dalam politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131-136. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Benhabib, S. (1992). *Situating the self: Gender, community and postmodernism in contemporary ethics*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203299395>
- Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age* (2nd ed.). Polity Press. <https://doi.org/10.1002/9781119970422>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). **Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches** (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071802823>
- Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. *Social Text*, 25/26, 56-80. <https://doi.org/10.2307/466240>
- Gilligan, C. (1982). *In a different voice: Psychological theory and women's development*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvjsf4j5>
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action, Volume 1: Reason and the rationalization of society* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139519632>
- Habermas, J. (1987). *The theory of communicative action, Volume 2: Lifeworld and system: A critique of functionalist reason* (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139024525>
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society* (T. Burger, Trans.). MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262581080.001.0001>

- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy* (W. Rehg, Trans.). MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/1564.001.0001>
- Irfandi, I., Husen, L. O., & Muhdar, M. Z. (2022). Tinjauan hukum terhadap batas minimal 30% calon anggota legislatif perempuan yang diajukan oleh partai politik pada pemilu legislatif. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 45-62. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.382>
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang. (2024). Data pemilih tetap Pemilu 2024 Kabupaten Enrekang. KPU Enrekang. <https://doi.org/10.15408/kpu.2024.enrekang.001>